

Analisis Transformasi dan Rasionalisasi Layanan Pemakaman pada Husnul Khotimah Care di Yogyakarta dalam Konteks Perubahan Sosial Perkotaan

Andriana Maharani¹, Iqbal Fauzi Abadi², Zahra Fitri Oktavia³, Vito Afriza Fivendika⁴

¹Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ andrianamaharani.2023@student.uny.ac.id; ² iqbalfauzi.2023@student.uny.ac.id;

³ zahra506@student.uny.ac.id; ⁴ vitoafriza.2025@student.uny.ac.id

*Correspondent Author; andrianamaharani.2023@student.uny.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received:

23-05-2026

Revised:

11-07-2026

Accepted:

24-08-2026

Keywords

institusionalisasi;
rasionalisasi Weberian;
layanan pemakaman;
religious economy;
organisasi keagamaan urban

ABSTRACT

Urbanisasi dan penyempitan lahan di Yogyakarta telah mendorong transformasi layanan pemakaman dari praktik komunal menuju model terlembaga. Kajian mengenai proses internal institusionalisasi, rasionalisasi manajerial, serta negosiasi identitas keagamaan dan logika berbayar dalam organisasi nirlaba keagamaan masih terbatas. Penelitian ini mengisi gap tersebut melalui studi kasus tunggal kualitatif pada Husnul Khotimah Care (HK Care), unit layanan jenazah di bawah RS PKU Muhammadiyah Gamping. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen dan keluarga pengguna, observasi partisipatif di Taman Makam Nanggulan, Kulon Progo, serta studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi untuk menjamin keabsahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HK Care bertransformasi dari kegiatan pengajian informal menjadi organisasi formal dengan struktur keanggotaan, SOP baku, dan lahan pemakaman sendiri sejalan dengan tekanan institusional regulasi tata ruang dan profesionalisasi pelayanan. Rasionalisasi tampak pada prediktabilitas layanan 24 jam, efisiensi lahan melalui zonasi berbasis urutan waktu kematian dan persiapan liang lahat kosong, serta kontrol kelembagaan melalui kebijakan keanggotaan eksklusif. Di sisi lain, identitas keagamaan Muhammadiyah dan logika berbayar saling bernegosiasi sebagai solidaritas komunal dan investasi spiritual, bukan transaksi komersial. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan sosiologi kematian dan organisasi keagamaan dalam konteks urban Indonesia.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Pemakaman merupakan salah satu praktik sosial universal yang memiliki makna ritual, religius, dan komunal. Sebagai ritus peralihan, praktik penguburan tidak sekadar proses teknis pengelolaan jenazah, melainkan juga sarana pemulihan keterikatan sosial bagi

keluarga yang ditinggalkan (Firdaus et al., 2023). Dalam konteks perkotaan, praktik pemakaman menghadapi tekanan struktural yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi, mobilitas penduduk, dan penyempitan lahan terbuka. Keterbatasan lahan pemakaman umum di kawasan perkotaan telah mendorong munculnya berbagai model pengelolaan baru yang semakin terlembaga, terstruktur, dan pada banyak kasus, terintegrasi dengan mekanisme pasar (Ziad, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Pertama, secara empirik, belum banyak kajian akademik yang secara spesifik menganalisis proses transformasi internal sebuah agensi pemakaman keagamaan di Indonesia dari perspektif sosiologis. Kedua, secara teoritis, kajian ini menawarkan kontribusi dalam memahami bagaimana rasionalisasi Weberian beroperasi dalam konteks organisasi nirlaba keagamaan, yang tidak sepenuhnya mengikuti logika profit-maximizing namun juga tidak bebas dari kalkulasi instrumental. Ketiga, secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal untuk memperoleh pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) terhadap dinamika transformasi dan rasionalisasi yang terjadi dalam satu unit analisis yang terbatas namun *information-rich* (Creswell, 2016).

Dengan mempertimbangkan urgensi akademik dan empiris tersebut, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul "Analisis Transformasi dan Rasionalisasi Layanan Pemakaman pada Husnul Khotimah Care di Yogyakarta dalam Konteks Perubahan Sosial Perkotaan".

Method

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam (*in-depth understanding*) makna, proses, dan dinamika sosial yang terjadi dalam konteks alami (*natural setting*) praktik layanan pemakaman pada Husnul Khotimah Care (HK Care). Sebagaimana diungkapkan Creswell (2016), penelitian kualitatif sesuai digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami fenomena kompleks yang melibatkan interaksi manusia, nilai, dan struktur sosial dalam konteks historis dan kultural tertentu.

Desain studi kasus tunggal dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa HK Care merupakan kasus yang kritis (*critical case*) dan informasi-kaya (*information-rich*) untuk memahami fenomena transformasi layanan pemakaman keagamaan dalam konteks perubahan sosial perkotaan (Yin, 2018). Menurut Yin (2018), studi kasus tunggal dapat digunakan secara meyakinkan ketika kasus tersebut merepresentasikan kasus ekstrem, unik, atau revelatoris yaitu kasus yang memperlihatkan fenomena yang sebelumnya tidak terlihat atau sulit diakses. HK Care merepresentasikan kasus revelatoris karena merupakan contoh langka dari institusionalisasi praktik keagamaan komunal (pengajian) menjadi organisasi layanan kematian formal yang memadukan logika dakwah, rasionalisasi birokrasi, dan mekanisme layanan berbayar dalam satu tatanan kelembagaan.

Secara spesifik, studi kasus ini bersifat instrumental (Stake, 1995). Artinya, HK Care tidak dipelajari karena kepentingan intrinsik kasus itu sendiri, melainkan karena kasus tersebut memberikan wawasan untuk memahami isu yang lebih besar: bagaimana organisasi keagamaan merespons tekanan perubahan sosial perkotaan melalui transformasi dan rasionalisasi layanan. Dengan demikian, unit analisis dalam penelitian ini adalah kelembagaan Husnul Khotimah Care sebagai organisasi layanan pemakaman keagamaan, dengan batasan spasial pada lokasi operasionalnya di Yogyakarta dan Nanggulan, Kulon Progo.

Results and Discussion

Hasil

A. Transformasi Layanan Pemakaman dari Komunitas Menuju Kelembagaan Formal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Husnul Khotimah *Care* lahir dari praktik komunal keagamaan yang berakar pada aktivitas pengajian rutin jamaah Muhammadiyah di lingkungan RS PKU Muhammadiyah Gamping. Menurut H. Umar Said Prawoto, S.Ag., selaku Wakil Ketua Pelayanan Rukti Jenazah, kegiatan tersebut telah berlangsung sejak puluhan tahun silam dalam bentuk himpunan infak dari jamaah pengajian. Sebagaimana diungkapkan informan, "*Awalnya hanya rukti jenazah, diawali dengan menghimpun keanggotaan dari jamaah pengajian, PKU Muhammadiyah ada pengajian Rabu Pahing (selapan) 35 hari sekali, sudah sejak dulu, sudah puluhan tahun. Awalnya pengajian hanya untuk dana infak yang pasien ga mampu, lalu kita punya program ini*" (Wawancara, 4 Mei 2026). Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa pada fase awal, praktik yang berlangsung masih bersifat informal, sukarela, dan terikat pada solidaritas komunitas keagamaan semata.

Konteks afiliasi dengan Muhammadiyah menjadi katalisator utama transformasi ini. Pengajian Rabu Pahing yang menjadi cikal bakal HK *Care* merupakan aktivitas jamaah Muhammadiyah yang telah menjadi bagian dari ekosistem RS PKU Muhammadiyah Gamping. Afiliasi ini memberikan legitimasi keagamaan, akses terhadap jaringan donatur Muhammadiyah, dan dukungan institusional dari pimpinan rumah sakit. Tanpa fondasi Muhammadiyah, transformasi dari kegiatan pengajian menjadi unit layanan formal dengan akuisisi lahan kemungkinan besar tidak akan terjadi, mengingat besarnya dana dan koordinasi yang dibutuhkan.

Transformasi signifikan terjadi ketika pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah menginisiasi penyempurnaan layanan dengan menambahkan dimensi penyediaan lahan pemakaman. Proses akuisisi lahan seluas kurang lebih satu hektar di Nanggulan, Kulon Progo, tidak berlangsung singkat. Beberapa lokasi calon sempat ditolak oleh masyarakat sekitar karena alasan sosial, sementara lokasi lain memiliki harga yang tidak memungkinkan. Proses pembelian lahan di Nanggulan sendiri mengalami komplikasi hukum yang berkepanjangan hingga berujung pada penyelesaian di tingkat Mahkamah Agung. Dana untuk akuisisi dan penyiapan lahan tidak berasal dari modal institusional yang utuh, melainkan dikumpulkan secara bertahap melalui pendekatan kepada para donatur. Baru pada April 2021, setelah proses panjang yang mendekati satu dekade, lahan pemakaman tersebut dapat dioperasionalkan secara resmi.

Dengan dimilikinya lahan pemakaman sendiri, HK *Care* mengalami pergeseran ontologis dari sekadar kegiatan komunitas pengajian menjadi unit layanan formal yang terintegrasi dengan Rumah Sakit. Organisasi tersebut kini memiliki struktur keanggotaan terpisah, sistem iuran yang terstandarisasi, prosedur operasional baku, serta pembagian peran antara pengelola, petugas lapangan, dan administrasi. Pergeseran nilai dari komunal ke modernisasi tampak jelas pada tahap ini: kematian yang semula dipandang sebagai peristiwa komunal reaktif yang ditangani oleh jaringan sosial terdekat berbasis solidaritas sukarela, telah direkonstruksi menjadi transisi *life course* yang dapat diantisipasi, dibiayai, dan diintegrasikan ke dalam perencanaan hidup bersama institusi. Anggota tidak lagi mengandalkan "bantuan tetangga" saat ada keluarga meninggal, melainkan mengandalkan prosedur administratif yang jelas: menghubungi contact person 24 jam, menunjukkan kartu keanggotaan, dan seluruh prosesi akan di-handle oleh petugas terlatih. Visi kelembagaan yang dikembangkan pun semakin luas, yakni menyediakan layanan paripurna dalam siklus hidup manusia. Sebagaimana dijelaskan H. Umar Said Prawoto, "*Latar belakangnya ingin punya pelayanan yang paripurna... kalo mau melahirkan di rumah sakit, kalo mau imunisasi... bahkan sampai dewasa, kita punya gedung kalo mau nikah, dan kalo sudah meninggal bisa dimakamkan kesini, paripurna nya seperti itu*" (Wawancara, 4 Mei 2026).

Bagi keluarga pengguna jasa, transformasi tersebut bukan sekadar perubahan struktural organisasi, melainkan juga rekonstruksi makna keanggotaan. Ust. Dr. Adib Sofia, S.S., M.Hum., selaku istri dari pengguna jasa, menyebutkan bahwa keputusan keluarganya untuk menggunakan layanan HK Care didasarkan pada jejak keanggotaan generasi sebelumnya yang diperkuat oleh aktivitas keagamaan. Sebagaimana diungkapkannya, "*Sudah menjadi keanggotaan dari bapak ibu juga. Karena saya dan suami juga aktifis muhammadiyah*" (Wawancara, 19 Mei 2026). Temuan ini mengonfirmasi bahwa meskipun terjadi modernisasi struktural, nilai-nilai komunal tidak sepenuhnya hilang, namun ditransformasi menjadi bentuk baru. Keanggotaan HK Care kini bukan sekadar ikut-ikutan pengajian untuk bantu-membantu saat ada jenazah, melainkan komitmen keagamaan yang diwariskan antargenerasi dan diinstitusionalisasi melalui mekanisme administratif modern (iuran rutin, kartu anggota, dan hak pemakaman yang terjamin).

B. Rasionalisasi dalam Pengelolaan Layanan Pemakaman

Dalam tatanan operasionalnya, HK Care menampilkan berbagai bentuk rasionalisasi yang mencakup aspek prosedural, spasial, dan kelembagaan. Dari sisi prosedural, organisasi ini telah menyusun mekanisme pelayanan yang terprediksi, terukur, dan terstandarisasi. Standarisasi prosedur menjadi pilar utama diferensiasi HK Care dari praktik pengurusan jenazah komunal tradisional.

Standarisasi prosedur tampak pada beberapa aspek. Pertama, mekanisme respons 24 jam. Setiap anggota yang meninggal cukup menghubungi *contact person* yang tersedia selama dua puluh empat jam, dan seluruh rangkaian prosesi dari penjemputan jenazah hingga pengantaran ke liang lahat akan ditangani oleh petugas tanpa memerlukan negosiasi tambahan dari keluarga. H. Umar Said Prawoto menjelaskan bahwa "*Kalau meninggal di RS lebih mudah, tinggal menyampaikan saja, oleh petugas akan dilayani rukti jenazah, langsung di-handle sampai proses rumah duka dan pengantaran ke liang lahat*" (Wawancara, 4 Mei 2026). Mekanisme ini merefleksikan logika birokrasi modern di mana ketidakpastian situasi kematian dikelola melalui prosedur yang jelas, dapat diulang, dan tidak bergantung pada siapa petugas yang bertugas.

Kedua, standarisasi tata cara rukti jenazah. HK Care menetapkan prosedur baku yang mencakup pemandian jenazah, pengkafanan, penyolatan, dan penguburan sesuai tata cara Muhammadiyah. Prosedur ini tidak boleh diubah-ubah berdasarkan permintaan individual keluarga; ia bersifat universal bagi semua jenazah yang ditangani. Standarisasi ini menciptakan prediktabilitas bagi keluarga duka, mereka tahu persis apa yang akan terjadi, siapa yang akan melakukan, dan berapa lama prosesnya.

Ketiga, standarisasi administrasi. HK Care menggunakan formulir pendaftaran anggota yang seragam, sistem penomoran kavling yang terstruktur, dan kartu keanggotaan sebagai bukti hak akses. Dokumentasi visual menunjukkan adanya formulir pendaftaran tertulis, brosur layanan dengan informasi terstandarisasi, dan sistem registrasi resmi. Standarisasi administrasi ini menggantikan sistem komunal yang bergantung pada ingatan kolektif dan hubungan personal.

Dari sisi spasial, rasionalisasi tampak pada pengelolaan lahan yang mengutamakan efisiensi dan kalkulasi teknis. Pengelola secara rutin menyiapkan liang lahat kosong sebelum ada jenazah yang akan dimakamkan, sehingga proses penggalian tidak perlu dilakukan secara mendadak. Sistem zonasi yang diterapkan menggunakan pembagian blok atas dan bawah, dengan pengisian kavling berdasarkan urutan waktu kematian secara kronologis, bukan berdasarkan preferensi atau pemesanan dari keluarga. Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini, di mana seluruh nisan tersusun rapi dalam deretan yang sama rata, terbuat dari beton putih dengan ukuran dan desain seragam, lengkap dengan nomor registrasi resmi. Tidak adanya perbedaan visual antar makam, kecuali satu lokasi khusus untuk tokoh sentral organisasi, mengindikasikan bahwa prinsip egalitarian

menjadi dasar penataan ruang, sekaligus sebagai mekanisme kontrol terhadap diferensiasi status sosial.

Dari sisi kelembagaan, kontrol dilakukan melalui kebijakan keanggotaan yang eksklusif. Lahan pemakaman secara umum hanya disediakan bagi anggota yang telah terdaftar dan memenuhi masa keanggotaan minimal, sementara non-anggota hanya dapat mengakses layanan dengan rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah. Pengelola secara sadar membatasi ekspansi pendaftaran, termasuk tidak membuka kanal pendaftaran secara daring, dengan pertimbangan untuk menjaga kapasitas layanan dan menghindari orientasi komersial yang berlebihan. Sebagaimana diungkapkan H. Umar Said Prawoto, "*Kita mikirnya kalo kita buka (pendaftaran online), kita ga buka aja udah kewalahan, kalo di medsos biar mereka aja, kalo pihak sini yang buka kita bukan yang komersil*" (Wawancara, 4 Mei 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tegangan sadar antara kebutuhan rasionalisasi ekspansi layanan dan etos anti-komersialisasi yang dipegang lembaga.

Di sisi lain, strategi kontrol juga diarahkan ke luar lembaga melalui pembangunan legitimasi sosial dengan masyarakat sekitar pemakaman. Kegiatan buka puasa bersama, pembagian daging kurban, dan penyerapan tenaga kerja lokal untuk penggalian makam menjadi bagian dari manajemen risiko kelembagaan. H. Umar Said Prawoto menyebutkan bahwa "*Kita perhatikan juga masyarakat (Donomulyo) kalau momen Idul Fitri/Ramadan, undang ke lokasi setempat untuk bukber atau bingkisan lebaran... masyarakat bisa ada rasa saling memiliki, harapan kami ada nilai-nilai sosial ekonomis didasarkan oleh masyarakat sekitar*" (Wawancara, 4 Mei 2026). Strategi ini secara fungsional bukan hanya membentuk relasi sosial, melainkan juga merupakan strategi manajemen risiko yang rasional untuk mengamankan keberlangsungan operasional jangka panjang di tengah potensi resistensi terhadap kehadiran pemakaman baru di suatu wilayah.

C. Negosiasi Identitas Keagamaan dan Logika Layanan Berbayar

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa HK Care menempati posisi ambivalen dalam spektrum ekonomi-religius. Di satu sisi, organisasi ini mengimplementasikan struktur tarif yang terukur, meliputi iuran keanggotaan bulanan sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah dan tarif pembelian kavling yang dibedakan antara anggota lama (lima juta rupiah) dengan anggota baru (tujuh juta lima ratus rupiah). Struktur biaya tersebut secara fungsional menyerupai mekanisme pasar, di mana akses terhadap lahan dan layanan sakral memerlukan kontribusi finansial terlebih dahulu.

Namun di sisi lain, seluruh transaksi ekonomi tersebut dibingkai ulang dalam narasi solidaritas komunal dan dakwah. Ust. Dr. Adib Sofia, misalnya, mempersepsikan layanan tersebut sebagai bentuk hubungan timbal balik yang melampaui nominal materi. Sebagaimana diungkapkannya, "*Layanan yang saya dapatkan lebih banyak daripada yang saya bayar*" (Wawancara, 19 Mei 2026). Persepsi ini mengindikasikan bahwa bagi pengguna, iuran tidak diposisikan sebagai pembayaran jasa komersial melainkan sebagai partisipasi dalam jaringan saling tolong-menolong yang bernilai spiritual.

Afiliasi dengan Muhammadiyah menjadi fondasi legitimasi yang memungkinkan negosiasi ini berlangsung. Sebagai organisasi keagamaan besar, Muhammadiyah memiliki modal kepercayaan (*trust*) dari jamaah yang membuat struktur berbayar tidak dipandang sebagai komersialisasi, melainkan sebagai bentuk pengorganisasian solidaritas umat. Identitas keagamaan Muhammadiyah menjadi fondasi yang membedakan HK Care dari layanan pemakaman lain. Eksklusivitas keagamaan dipertahankan secara ketat, di mana pemakaman hanya menerima jenazah Muslim dan seluruh prosesi rukti menggunakan tata cara yang sesuai dengan faham Muhammadiyah. Identitas keagamaan menjadi fondasi yang membedakan HK Care dari layanan pemakaman lain. Eksklusivitas keagamaan dipertahankan secara ketat, di mana pemakaman hanya menerima jenazah Muslim dan seluruh prosesi ruki menggunakan tata cara yang sesuai dengan faham Muhammadiyah.

Bagi keluarga pengguna, pemilihan HK *Care* sering kali bukan didasarkan pada pertimbangan lokasi atau harga semata, melainkan pada keinginan untuk menegaskan afiliasi keagamaan bahkan dalam tahap akhir kehidupan. Ust. Dr. Adib Sofia menjelaskan bahwa suaminya memiliki hak pemakaman di institusi lain, namun memilih HK *Care* karena alasan spiritual. Sebagaimana diutarakannya, "*Ketika suami nya hendak wafat ada Hak untuk di makamkan, di UGM, dan di rumah (Klaten). Tapi akhirnya ngikut di HK Muhammadiyah, karena sudah berwasiat untuk dirukti secara Muhammadiyah*" (Wawancara, 19 Mei 2026). Keputusan tersebut merefleksikan bahwa pilihan pemakaman telah menjadi aktor penegasan identitas keagamaan yang melampaui dimensi fungsional pengurusan jenazah.

Observasi lapangan memperlihatkan bahwa egalitarianisme visual di area pemakaman merupakan pernyataan teologis sekaligus resistensi terhadap komersialisasi estetika. Seragamnya nisan putih, tidak adanya ornamen tambahan, foto almarhum, maupun epitaf personal, menunjukkan bahwa kesetaraan di hadapan Tuhan diprioritaskan di atas ekspresi status sosial. Namun demikian, terdapat satu anomali signifikan berupa makam dengan nisan marmer yang berbeda untuk tokoh pendiri organisasi. Pengecualian ini mengindikasikan bahwa meskipun prinsip egalitarian ditegakkan secara umum, terdapat ruang bagi diferensiasi simbolik yang didasarkan pada kontribusi historis terhadap kelembagaan, bukan pada kapasitas finansial.

Dinamika negosiasi juga tampak dalam praktik sehari-hari. Pengelola secara konsisten menegaskan bahwa lembaga ini adalah bagian dari dakwah dan pelayanan rumah sakit, bukan entitas bisnis. H. Umar Said Prawoto menegaskan bahwa "*Kita bagian dari dakwah dan kita bagian dari proses pelayanan rumah sakit, supaya orang mengenal itu dari pelayanan pelayanan yang ada*" (Wawancara, 4 Mei 2026). Pembatasan pendaftaran daring dan tidak adanya papan informasi tarif di lokasi pemakaman merupakan strategi untuk menjaga citra sosial-religius. Sementara itu, komunitas anggota sendiri turut mereproduksi legitimasi keagamaan tersebut melalui praktik advokasi informal. Ust. Dr. Adib Sofia menyebutkan bahwa "*Saya sering memposting HK di instagram, sehingga malah banyak teman yang mau mendaftar menjadi anggota*" (Wawancara, 19 Mei 2026). Fenomena ini mengindikasikan bahwa narasi dakwah tidak hanya dikonstruksi oleh pengelola secara *top-down*, melainkan juga ditegakkan oleh anggota sebagai bagian dari afiliasi identitas keagamaan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Terlebih lagi, terdapat ekspektasi dari pengguna agar area pemakaman dikembangkan menjadi ruang memorial yang tidak hanya menandai kematian, tetapi juga merekam kontribusi tokoh-tokoh organisasi, mirip dengan fungsi taman makam pahlawan. Ust. Dr. Adib Sofia mengemukakan harapan agar "*HK disitu adalah tokoh-tokoh penting Muhammadiyah mungkin ada semacam resume tokoh siapa aja (profil setiap siapa saja yang dimakamkan, perjuangan nya apa, seperti taman makam pahlawan) jadi diingat dan selalu di kenal*" (Wawancara, 19 Mei 2026). Ekspektasi ini mengisyaratkan bahwa di tengah logika berbayar yang berlaku, masyarakat tetap mencari makna kolektif dan historis yang dapat mengangkat dimensi spiritual pemakaman dari sekadar transaksi individual menuju warisan keagamaan bersama.

Pembahasan

A. Transformasi Layanan Berbasis Komunitas Menuju Kelembagaan Formal

Temuan empiris menunjukkan bahwa transformasi Husnul Khotimah Care dari kegiatan rukti jenazah berbasis komunitas pengajian menjadi unit layanan formal yang terintegrasi dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah merepresentasikan proses institusionalisasi yang komprehensif. Dalam kerangka sosiologi organisasi, institusionalisasi merujuk pada proses di mana praktik-praktik interaksional yang berulang menjadi terhakikan, objektif, dan akhirnya membentuk struktur sosial yang memiliki kewenangan tersendiri (Berger & Luckmann, 1967).

Namun, yang penting untuk dicatat adalah adanya pergeseran nilai yang menyertai proses institusionalisasi ini. Dalam sistem komunal tradisional, nilai yang mendominasi adalah solidaritas mekanik. Bantuan kepada jenazah merupakan kewajiban moral yang tidak terkait dengan imbalan finansial atau status keanggotaan formal. Kematian adalah urusan bersama yang ditangani oleh jaringan sosial terdekat berbasis kepercayaan dan rasa saling memiliki. Sebaliknya, dalam sistem HK *Care* yang telah terlembaga, nilai solidaritas tersebut ditransformasi menjadi bentuk yang kompatibel dengan tatanan modern. Ritual ini diinstitusionalisasi melalui mekanisme iuran rutin, kartu keanggotaan, dan hak akses yang terdefinisi. Solidaritas tidak lagi bersifat situasional dan personal, melainkan terstruktur, terjadwal, dan terukur.

Pergeseran nilai ini bukan berarti hilangnya nilai komunal sama sekali. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai komunal seperti solidaritas antar jamaah, kebersamaan dalam pengurusan jenazah, dan kepedulian terhadap sesama tetap eksis, namun dalam bentuk yang telah "diterjemahkan" ke dalam bahasa organisasi modern. Misalnya, iuran bulanan yang semula mungkin dipandang sebagai pembayaran jasa kini dibingkai sebagai partisipasi dalam jaringan saling tolong-menolong. Kartu keanggotaan yang bersifat administratif juga memiliki makna simbolis sebagai tanda keanggotaan Muhammadiyah. Dengan demikian, modernisasi yang terjadi di HK *Care* merupakan reframing nilai-nilai lama yang diberi wadah baru yang sesuai dengan tuntutan efisiensi dan prediktabilitas organisasi modern.

Untuk memahami mengapa organisasi keagamaan seperti HK *Care* mengadopsi bentuk-bentuk formal yang semakin mirip dengan organisasi modern seperti struktur keanggotaan terpisah, SOP, dan akuisisi lahan diperlukan perspektif yang lebih spesifik mengenai mekanisme homogenisasi kelembagaan. DiMaggio & Powell (1983) dalam artikel klasiknya menjelaskan bahwa setelah sebuah kelompok organisasi muncul sebagai *field institutional*, terjadi paradoks di mana aktor rasional membuat organisasinya semakin serupa ketika mereka mencoba mengubahnya. Proses ini, yang disebut *institutional isomorphism*, tidak selalu didorong oleh efisiensi pasar, melainkan oleh tekanan koersif dan normatif dari lingkungan institusional. Dalam konteks HK *Care*, tekanan koersif tampak dari kebutuhan untuk memenuhi regulasi pemerintah mengenai jarak pemakaman dari pemukiman dan persyaratan perizinan, sementara tekanan normatif bersumber dari profesionalisasi pengelolaan jenazah di kalangan jamaah Muhammadiyah yang semakin mengedepankan standar pelayanan. Dengan demikian, transformasi HK *Care* bukan sekadar evolusi internal yang organik, melainkan respons terhadap tekanan institusional yang mendorong homogenisasi bentuk organisasi keagamaan menuju model birokrasi modern (DiMaggio & Powell, 1983).

Proses institusionalisasi tersebut juga perlu dipahami dalam konteks transformasi ruang kematian yang lebih luas di Indonesia. Salmon (2016) dalam studi historis-antropologisnya menelusuri bagaimana pemakaman tradisional di Indonesia secara bertahap bertransformasi menjadi memorial park modern yang terinspirasi dari model Amerika Serikat dan Asia Timur sejak awal tahun 2000-an. Transformasi ini tidak hanya bersifat fisik-spasial, tetapi juga mencakup perubahan makna fundamental: dari ruang sakral kolektif menuju komoditas real estate yang menawarkan eksklusivitas, estetika lanskap, dan layanan profesional. Meskipun HK *Care* tidak sepenuhnya mengikuti model komersial *memorial park* (sebagaimana ditunjukkan oleh penolakan pengelola terhadap orientasi komersial) proses akuisisi lahan seluas satu hektar di Nanggulan, penyusunan sistem zonasi, dan pengelolaan areal berkelanjutan menunjukkan bahwa organisasi keagamaan tersebut tidak dapat menghindari logika transformasi spasial yang sama. Yang membedakan HK *Care* dari model memorial park murni adalah bahwa transformasi kelembagaannya tetap terikat pada visi dakwah dan pelayanan paripurna, bukan pada

logika profit semata. Dengan kata lain, HK Care menempati posisi intermediasi antara pemakaman tradisional komunal dan memorial park komersial, di mana proses institusionalisasi berlangsung tanpa mengorbankan fondasi keagamaan (Salmon, 2016).

Lebih jauh, proses institusionalisasi di HK Care juga mengubah cara individu memandang kematian dalam trajektori kehidupannya. Sebelum terlembaganya, pengurusan jenazah merupakan tanggung jawab jaringan sosial terdekat yang bersifat reaktif dan situasional. Setelah transformasi, kematian menjadi peristiwa yang dapat diantisipasi melalui mekanisme keanggotaan, iuran rutin, dan perencanaan lahan. Perubahan ini merefleksikan apa yang disebut Berger & Luckmann (1967) sebagai habituaisasi dan legitimasi, yaitu praktik pengurusan jenazah yang semula sporadis menjadi terhakikan melalui sistem iuran bulanan, kemudian dilegitimasi sebagai bagian dari misi dakwah Muhammadiyah. Bagi keluarga pengguna seperti Ust. Dr. Adib Sofia, keanggotaan HK Care bukan sekadar pilihan utilitarian, melainkan komitmen keagamaan yang diwariskan antargenerasi. Hal ini menunjukkan bahwa institusionalisasi berhasil mentransformasi tidak hanya struktur organisasi, tetapi juga habitus keagamaan keluarga dalam menghadapi kematian.

B. Rasionalisasi dalam Pengelolaan Layanan Pemakaman

Temuan mengenai penerapan SOP baku, sistem zonasi lahan, dan kontrol keanggotaan eksklusif di HK Care dapat dianalisis secara mendalam melalui kerangka rasionalisasi Max Weber sebagaimana dikembangkan oleh Kalberg (1990). Weber mengidentifikasi rasionalisasi sebagai proses di mana tindakan sosial yang tradisional atau afektif semakin diarahkan pada pertimbangan instrumental dan peraturan formal. Kalberg (1990) membedakan empat tipologi rasionalitas, di mana *formal rationality* (pengaturan tindakan berdasarkan aturan, prosedur, dan kalkulasi yang dapat diprediksi) menjadi ciri dominan organisasi modern.

Dalam konteks HK Care, dimensi prediktabilitas tampak jelas pada mekanisme pelayanan jenazah yang terstandarisasi. Keluarga anggota cukup menghubungi contact person 24 jam, dan seluruh prosesi dari penjemputan hingga penguburan ditangani oleh petugas. Standarisasi prosedur ini menggantikan ketidakpastian situasi kematian, yang secara tradisional memerlukan improvisasi komunal dengan prosedur yang jelas dan dapat diandalkan. Bagi keluarga yang sedang berduka, eliminasi kebutuhan untuk membuat keputusan di tengah kondisi emosional yang rentan merupakan manifestasi dari rasionalitas instrumental yang berorientasi pada pengurangan ketidakpastian (Kalberg, 1990). Standarisasi juga menciptakan interchangeability, petugas mana pun yang bertugas dapat melaksanakan prosedur yang sama dengan hasil yang identik, mengurangi ketergantungan pada individu tertentu.

Dimensi efisiensi dan kalkulabilitas terlihat pada manajemen lahan pemakaman. Pengelola HK Care secara rutin menyiapkan liang lahat kosong sebelum ada jenazah yang akan dimakamkan, sehingga proses penggalian tidak perlu dilakukan secara mendadak. Sistem zonasi dengan pembagian blok atas dan bawah, serta penentuan kavling berdasarkan urutan waktu kematian secara kronologis, merupakan bentuk kalkulasi spasial yang rasional atas sifat kematian yang tidak dapat diprediksi waktunya. Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini, di mana seluruh nisan tersusun rapi dengan ukuran dan desain seragam, lengkap dengan nomor registrasi resmi. Seragamnya nisan putih dan tidak adanya ornamen tambahan, foto, maupun epitaf personal menunjukkan bahwa prinsip egalitarian menjadi dasar penataan ruang. Namun demikian, terdapat satu anomali berupa makam dengan nisan marmer untuk tokoh pendiri organisasi. Pengecualian ini mengindikasikan bahwa meskipun prinsip egalitarian ditegakkan secara umum, rasionalisasi di HK Care tetap mempertahankan ruang bagi diferensiasi simbolik yang didasarkan pada kontribusi historis terhadap kelembagaan, bukan pada kapasitas

finansial. Fenomena ini merefleksikan bahwa rasionalisasi tidak berlangsung secara total, melainkan bernegosiasi dengan hierarki nilai keagamaan yang tetap mengakomodasi penghormatan terhadap tokoh pendiri.

Dari perspektif kontrol kelembagaan, HK *Care* menerapkan kebijakan eksklusivitas yang ketat. Lahan pemakaman secara umum hanya disediakan bagi anggota yang telah terdaftar, sementara non-anggota memerlukan rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah. Pembatasan pendaftaran daring juga merupakan strategi kontrol untuk menghindari permintaan yang melampaui kapasitas. Menariknya, pengelola secara sadar menolak ekspansi komersial dengan alasan untuk menjaga karakter sosial-religius lembaga. Sebagaimana diungkapkan pengelola, lembaga ini bukan entitas komersial melainkan bagian dari dakwah. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tegangan antara logika rasionalisasi dengan etos antikomersialisasi yang dipegang organisasi. Di sini, kontrol tidak hanya bersifat internal terhadap anggota, tetapi juga eksternal terhadap potensi transformasi pasar. Strategi pembangunan legitimasi dengan masyarakat sekitar melalui buka puasa bersama, pembagian daging kurban, dan penyerapan tenaga kerja lokal merupakan bentuk manajemen risiko kelembagaan yang rasional untuk mengamankan keberlangsungan operasional jangka panjang.

C. Negosiasi Identitas Keagamaan dan Logika Layanan Berbayar

Temuan mengenai posisi ambivalen HK *Care* dalam spektrum ekonomi-religius dapat dianalisis melalui perspektif *religious economy* yang dikembangkan Finke & Stark (1988). Dalam kerangka ini, organisasi keagamaan dipandang sebagai aktor dalam pasar spiritual yang kompetitif, di mana mereka harus menyeimbangkan misi teologis dengan kebutuhan organisasional, termasuk akuisisi sumber daya, perluasan anggota, dan keberlanjutan finansial. Finke & Stark (1988) menunjukkan bahwa organisasi keagamaan yang beroperasi dalam lingkungan pluralistik sering kali mengadopsi strategi mobilisasi yang memadukan insentif materi dan non-materi untuk menarik serta mempertahankan anggota.

HK *Care* menunjukkan dinamika serupa, organisasi ini mengimplementasikan struktur tarif yang terukur (meliputi iuran bulanan dan tarif pembelian kavling yang dibedakan antara anggota lama dan baru) namun seluruh transaksi ekonomi tersebut dibingkai ulang dalam narasi solidaritas komunal dan dakwah. Iuran tidak diposisikan sebagai pembayaran jasa komersial, melainkan sebagai partisipasi dalam jaringan saling tolong-menolong yang bernilai spiritual. Dengan demikian, HK *Care* beroperasi dalam pasar layanan kematian yang kompetitif di Yogyakarta tanpa sepenuhnya mengadopsi logika *profit-maximizing*, melainkan menegosiasikan antara misi dakwah dan kebutuhan operasional berbasis tarif (Finke & Stark, 1988).

Negosiasi tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan teori *the social meaning of money* dari Zelizer (1989). Zelizer menolak anggapan bahwa uang dalam masyarakat modern bersifat homogen, anonim, dan netral secara sosial. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa uang selalu dibingkai oleh makna kultural, moral, dan relasional tertentu, sehingga menciptakan apa yang disebutnya *special monies*. Dalam konteks HK *Care*, iuran keanggotaan dan tarif kavling merupakan *special monies* yang memiliki makna berbeda dari transaksi pasar umum. Bagi pengguna seperti Ust. Dr. Adib Sofia, pembayaran iuran bukan sekadar alat tukar utilitarian, melainkan juga ekspresi afiliasi identitas Muhammadiyah, solidaritas komunal, dan investasi spiritual untuk menjamin pengurusan jenazah sesuai syariat. Persepsinya bahwa "layanan yang saya dapatkan lebih banyak daripada yang saya bayar" mengindikasikan bahwa uang dalam konteks ini telah ditransformasi dari medium komersial menjadi medium relasional-religius. Zelizer (1989) menjelaskan bahwa proses earmarking (pemberian label dan batasan sosial pada uang) selalu terjadi dalam konteks di mana nilai sakral dan nilai ekonomi saling bersinggungan. Pada HK *Care*, earmarking tersebut tampak pada pemisahan antara dana iuran (untuk

rukti) dan dana kavling (untuk lahan), yang masing-masing dibingkai oleh narasi keagamaan yang berbeda (Zelizer, 1989).

Identitas keagamaan Muhammadiyah menjadi fondasi yang membedakan HK *Care* dari layanan pemakaman lain. Eksklusivitas keagamaan dipertahankan secara ketat, di mana pemakaman hanya menerima jenazah Muslim dan seluruh prosesi menggunakan tata cara sesuai faham Muhammadiyah. Bagi keluarga pengguna, pemilihan HK *Care* sering kali didasarkan pada keinginan untuk menegaskan afiliasi keagamaan bahkan dalam tahap akhir kehidupan. Keputusan untuk menggunakan HK *Care* meskipun memiliki hak pemakaman di institusi lain menunjukkan bahwa pilihan pemakaman telah menjadi aktor penegasan identitas keagamaan yang melampaui pertimbangan fungsional. Dalam perspektif *religious economy*, keputusan tersebut merefleksikan bahwa konsumen layanan keagamaan tidak selalu bertindak berdasarkan kalkulasi harga atau kualitas materi semata, melainkan juga berdasarkan kesesuaian teologis dan afiliasi komunitas. HK *Care* berhasil mempertahankan basis anggotanya bukan karena menawarkan harga terendah atau fasilitas termewah, melainkan karena menyediakan produk keagamaan yang dianggap autentik dan sesuai dengan identitas kolektif jamaah Muhammadiyah.

Namun demikian, negosiasi antara identitas keagamaan dan logika berbayar tidak berlangsung tanpa tegangan. Temuan mengenai ekspektasi pengguna agar area pemakaman dikembangkan menjadi ruang memorial yang merekam kontribusi tokoh-tokoh organisasi mengindikasikan adanya dinamika baru dalam memaknai kematian. Di satu sisi, pengelola menolak komersialisasi estetika melalui keseragaman nisan dan penolakan terhadap pemesanan kavling premium. Di sisi lain, masyarakat mulai menginginkan dimensi historisbiografis yang dapat mengangkat pemakaman dari sekadar ruang penguburan menuju warisan keagamaan bersama. Ekspektasi ini mengisyaratkan bahwa di tengah logika berbayar yang berlaku, terdapat kebutuhan akan makna kolektif yang melampaui transaksi individual. Di sinilah teori Zelizer (1989) kembali relevan bahwa uang dan transaksi ekonomi dalam organisasi keagamaan tidak pernah sepenuhnya terkomodifikasi, melainkan terus-menerus dinegosiasikan ulang melalui praktik-praktik sosial yang sarat makna. HK *Care* menunjukkan bahwa organisasi keagamaan dapat mengakomodasi mekanisme pasar tanpa mengorbankan identitas spiritualnya, asalkan seluruh transaksi tersebut berhasil dibingkai dalam narasi dakwah dan pelayanan umat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, proses transformasi layanan pemakaman pada Husnul Khotimah *Care* merupakan manifestasi dari institusionalisasi praktik keagamaan komunal dalam merespons tekanan perubahan sosial perkotaan. Berangkat dari kegiatan rukti jenazah informal yang berbasis jamaah pengajian Muhammadiyah di lingkungan RS PKU Muhammadiyah Gamping, HK *Care* secara bertahap bertransformasi menjadi unit layanan formal yang memiliki struktur keanggotaan terpisah, prosedur operasional baku, akuisisi lahan sendiri di Nanggulan, Kulon Progo, serta visi pelayanan paripurna sepanjang siklus hidup manusia. Transformasi ini didorong oleh serangkaian tekanan institusional meliputi tekanan koersif dari regulasi tata ruang dan perizinan pemakaman, tekanan mimik terhadap model manajemen modern, serta tekanan normatif dari profesionalisasi pelayanan keagamaan yang secara kolektif mendorong organisasi keagamaan menuju homogenisasi bentuk birokrasi modern tanpa menghilangkan fondasi spiritualnya. Dengan demikian, kematian yang semula dipandang sebagai peristiwa komunal reaktif telah direkonstruksi menjadi transisi life course yang dapat diantisipasi, dibiayai, dan diintegrasikan ke dalam perencanaan hidup bersama institusi keagamaan.

Kedua, rasionalisasi dalam pengelolaan layanan pemakaman HK *Care* tampak dalam

tiga dimensi utama. Dalam aspek prediktabilitas, organisasi menyusun SOP pelayanan jenazah yang terstandarisasi, di mana keluarga anggota cukup menghubungi *contact person* selama dua puluh empat jam dan seluruh prosesi akan ditangani tanpa perlu negosiasi tambahan. Dalam aspek efisiensi dan kalkulabilitas, pengelola menerapkan sistem zonasi berbasis urutan waktu kematian, persiapan liang lahat kosong secara rutin, serta penataan nisan seragam yang menegaskan prinsip egalitarianisme spasial. Dalam aspek kontrol kelembagaan, HK Care mempertahankan kebijakan keanggotaan eksklusif, pembatasan ekspansi pendaftaran, serta strategi pembangunan legitimasi sosial dengan masyarakat sekitar melalui ritual keagamaan bersama dan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun demikian, temuan mengenai adanya satu anomali berupa makam khusus dengan nisan marmer untuk tokoh pendiri organisasi mengindikasikan bahwa rasionalisasi tidak berlangsung secara total, melainkan bernegosiasi dengan hierarki nilai keagamaan yang tetap mengakomodasi penghormatan simbolik terhadap aktor kunci dalam sejarah kelembagaan.

Ketiga, identitas keagamaan Muhammadiyah dan logika layanan berbayar saling bernegosiasi dalam praktik pengelolaan HK Care melalui mekanisme earmarking sosial dan bingkai narasi dakwah. Struktur iuran bulanan serta tarif pembelian kavling yang dibedakan antara anggota lama dan anggota baru secara fungsional menyerupai mekanisme pasar, namun seluruh transaksi ekonomi tersebut dibingkai ulang dalam narasi solidaritas komunal, investasi spiritual, dan misi dakwah. Bagi pengguna jasa, pembayaran iuran bukan diposisikan sebagai transaksi komersial melainkan sebagai partisipasi dalam jaringan saling tolong-menolong yang bernilai sakral, sebagaimana tercermin dari keputusan keluarga untuk menggunakan HK Care semata-mata karena wasiat keagamaan meskipun memiliki alternatif pemakaman di institusi lain. Egalitarianisme visual melalui keseragaman nisan berfungsi sebagai resistensi terhadap komersialisasi estetika pemakaman, sekaligus pernyataan teologis mengenai kesetaraan di hadapan Tuhan. Namun demikian, munculnya ekspektasi dari anggota agar area pemakaman dikembangkan menjadi ruang memorial yang merekam kontribusi tokoh-tokoh organisasi mengisyaratkan bahwa di tengah logika berbayar yang berlaku, masyarakat tetap mencari makna kolektif dan historis yang dapat mengangkat dimensi spiritual pemakaman dari sekadar transaksi individual menuju warisan keagamaan bersama.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi dan rasionalisasi layanan pemakaman pada HK Care bukan sekadar respons teknokratis terhadap keterbatasan lahan dan urbanisasi. Transformasi ini merupakan proses sosial kompleks yang melibatkan rekonstruksi institusional, adaptasi birokratis, dan negosiasi moral antara nilai sakral dengan imperatif organisasional dalam konteks perkotaan Yogyakarta.

References

- Affandy, S. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus : Pemakaman San Diego Hills Dan AlAzhar). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48, 147–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101>
- Finke, R., & Stark, R. (1988). Religious Economies and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American Cities, 1906. *American Sociological Review*, 53(1), 41. <https://doi.org/10.2307/2095731>
- Firdaus, A., Kamaluddin, K., & Fitriani, F. (2023). Tata Cara Pemakaman Menurut Agama Islam dan Kristen di Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 819–825. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.281>
- Kalberg, S. (1980). Max Weber's types of rationality: cornerstones for the analysis of rationalization processes in history. *American Journal of Sociology*, 85(1145–1179).
- Kalberg, S. (1990). The Rationalization of Action in Max Weber's Sociology of Religion. *Sociological Theory*, 8(1), 58. <https://doi.org/10.2307/202195>
- Kurniawan, R. A., & Sujadi, S. (2024). Layanan Pemakaman Mewah Muslim: Komodifikasi dan Reinterpretasi Pemakaman. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(4). <https://doi.org/10.20961/jas.v13i4.97194>
- Kurniawan, R. A., & Sujadi, S. (2024). Layanan Pemakaman Mewah Muslim: Komodifikasi dan Reinterpretasi Pemakaman. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 13(4). <https://doi.org/10.20961/jas.v13i4.97194>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
- Salmon, C. (2016). From cemeteries to luxurious memorial parks, with special reference to Malaysia and Indonesia. *Archipel*, 92, 177–212. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/archipel.320>
- Scott, J. C. (1976). The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Yale University Press.
- Setia, P., Rosele, M. I., & Dilawati, R. (2026). Moral Economy of Death: Religious Legitimacy and Social Obligations in Ta'ziah Practices in Indonesia. *FOCUS*, 7(1), 75–86.

<https://doi.org/10.26593/r5nr5p53> Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.

Stark, R., & Finke, R. (2000). Acts of faith: Explaining the human side of religion. University of California Press. Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). Sage Publications.

Zelizer, V. A. (1989). The social meaning of money: "Special monies." American Journal of Sociology, 95(2), 342-377. Ziad, M. T. I. (2011). Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Sleman. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. 37